

Memperbincangkan Pengangguran Sarjana

Semakin besarnya jumlah pengangguran para sarjana, seringkali yang tersalahkan adalah perguruan tinggi pencetak sarjana itu. Padahal perguruan tinggi, selalu saja begitu bangganya tatkala berhasil mewisuda mereka. Para pimpinan perguruan tinggi merasa telah berhasil menunaikan tugasnya, manakala telah mampu menyelenggarakan perkuliahan, menyediakan laboratorium, perpustakaan dan dosen yang mengajar tepat waktu. Memang akhir-akhir ini perguruan tinggi dijalankan seperti birokrasi, semua diatur seperti mesin. Perumpamaan itu rasanya memang tepat, sebab pada kenyataannya jalannya proses belajar mengajar diatur sedemikian rupa. Setiap mahasiswa untuk meraih gelar sarjana harus mengambil sejumlah mata kuliah yang ditakar dalam ukuran sks. Setiap sks terdiri atas kegiatan tatap muka dengan dosen 40 menit, kegiatan terstruktur 40 menit dan kerja mandiri 40 menit. Jika seseorang pada satu semester mengambil 24 sks, artinya mahasiswa itu harus belajar pada setiap minggunya $24 \times 120 \text{ menit (2 jam)} = 48 \text{ jam}$. Dengan perhitungan ini, maka jika mahasiswa harus bekerja 6 hari, setiap hari harus belajar 8 jam.

Di atas kertas, sesungguhnya penggunaan sistem kredit semester ini, akan menjadikan mahasiswa mendapatkan pengetahuan dan keahlian yang cukup. Akan tetapi, seringkali dalam praktek pelaksanaannya di lapangan, belum tentu hitungan tersebut berjalan demikian. Tidak sedikit mahasiswa, belajarnya tidak melaksanakan ketentuan yang dituntut oleh sistem kredit itu. Mereka hanya sebatas mengikuti kuliah tatap muka dengan dosen. Tugas-tugas lainnya, seperti belajar terstruktur dan apalagi belajar mandiri belum tentu dilakukan secara disiplin. Jika pun, belajar di kampus harus dilengkapi dengan tugas-tugas penulisan makalah, maka itu pun juga tidak dijalankan setiap saat. Tidak sedikit mahasiswa yang merasa cukup, sekedar kuliah dan kemudian di akhir semester mengikuti ujian. Konsep belajar di perguruan tinggi dengan menggunakan pendekatan sistem kredit, hanya dijalankan secara terbatas, dan kadang kala malah terlalu minim. Jika benar ini yang terjadi, maka pantaslah setelah dikukuhkan menjadi sarjana pun, tampak penampilannya sarjana tersebut kurang meyakinkan.

Akibatnya, setelah menjadi sarjana, mereka gagab. Memang ada pameo yang kurang selayaknya diikuti, yakni dapat ijazah sarjana dulu, belajar kemudian. Mereka menganggap, yang terpenting adalah ijazah. Pengembangan ilmu bisa dilakukan kemudian. Ada pandangan yang memisahkan antara memperkaya diri dengan ilmu dan usaha mendapatkan ijazah. Padahal seharusnya keduanya tidak boleh dipisahkan. Ijazah hanya akan diberikan oleh pimpinan perguruan tinggi kepada seseorang yang telah menempuh belajar dan lulus dalam sejumlah mata kuliah tertentu, dalam kurun waktu tertentu. Pandangan yang mengatakan "ijazah dulu ilmu kemudian", tentu akan merusak jiwa belajar di perguruan tinggi. Pendidikan akhirnya hanya dijalankan sebatas formalnya dan akhirnya menjadi formalitas. Pendidikan kemudian kehilangan ruhnya, sedangkan yang tersisa adalah jasadnya, berupa dokumen aktivitas belajar, di antaranya adalah selebar ijazah itu.

Fenomena ini rupanya sudah umum terjadi di mana-mana. Padahal, akibatnya dengan memiliki ijazah tanpa dibarengi dengan pengetahuan yang cukup, justru akan menambah beban hidup. Suatu ketika saya membaca spanduk, yang rasanya jika direnungkan akan sangat menyakitkan. Spanduk itu berbunyi : "Untuk Apa Menyandang Gelar Sarjana Jika Akhirnya Menjadi Pengangguran". Spanduk seperti itu beberapa lama terpampang di perempatan kota, tetapi tidak mengundang protes dari siapapun. Artinya,

isi sependuk itu rupanya sudah benar-benar menggambarkan kenyataan yang ada di lapangan.

Lemahnya kualitas lulusan perguruan tinggi bisa jadi disebabkan oleh penyelenggaraan pendidikan yang asal-asalan. Demi mengejar jumlah mahasiswa, maka tidak sedikit perguruan tinggi membuka beraneka ragam program tanpa memberikan batasan cukup untuk menjaga kualitas. Kita lihat di mana-mana dibuka perguruan tinggi dengan berbagai statusnya, misalnya ada perguruan tinggi induk, perguruan tinggi cabang, kelas dekat maupun kelas jauh, mahasiswa reguler, ekstensi, kelas sabtu minggu, kelas eksekutif dan masih banyak lagi istilah yang digunakan. Semua itu sudah barang tentu sulit dipertanggung jawabkan kualitasnya. Yang penting, semua sudah dijalankan sesuai dengan takaran atau aturan kuantitatifnya. Karena pendekatannya adalah kuantitatif, maka sering kita dengar program pemadatan, baik satuan waktu kuliah maupun penghitungan jam perkuliahan dalam setiap semester. Munculah jam kuliah pendek, semester pendek dan bahkan juga kuliah perbaikan nilai. Bukan perbaikan penguasaan ilmu, melainkan perbaikan nilai. Jika seperti itu halnya, pameo yang mengatakan ijazah dulu ilmu kemudian, rasanya menjadi tidak terlalu salah. Akan tetapi, persoalannya adalah bagaimana bangsa ini ke depan jika pendidikan dimaknai terlalu sederhana seperti itu.

Penyelenggaraan pendidikan yang asal-asalan otomatis berakibat kualitas yang dihasilkan juga tidak sepenuhnya sempurna. Lahirlah kemudian sarjana yang tidak penuh, artinya kurang berkualitas. Inilah sesungguhnya, *causa prima* terjadinya pengangguran sarjana. Dengan sistem yang kurang ditaati itu maka lahirlah sarjana pertanian yang tidak memiliki pengetahuan tentang pertanian, sarjana peternakan yang asing dengan dunia ternak, sarjana ekonomi yang tidak memiliki wawasan ekonomi, sarjana pendidikan yang tidak paham pendidikan dan demikian pula sarjana agama yang tidak mengenali kitab suci agama yang dipelajari, serta tidak mengerti di mana tempat ibadah yang harus didatangi setiap saat.

Para sarjana berkualitas asal-asalan itu kemudian menganggur. Sekalipun telah memegang ijazah sarjana, tetapi tetap tidak mampu sekalipun sebatas mengembangkan bidang ilmunya, oleh karena bekal yang diperoleh kurang mencukupi. Fenomena banyaknya sarjana menganggur memang terasa ganjil dan aneh. Lebih-lebih jika kita ingat atas pertanyaan, apa yang kurang di negeri ini. Negeri yang memiliki potensi kekayaan alam yang luar biasa besarnya. Tanah yang subur, hutan, laut, tambang, yang hampir tidak terbatas jumlahnya. Maka, semestinya sebatas ingin bekerja, jika mau bertani, betapa luas tanah yang menganggur. Mau menjadi nelayan, betapa luas laut dan samodra di Indonesia. Mau berkreasi menjadi pengrajin, pedagang, dan jenis usaha lain, sedemikian banyak peluang yang tersedia, seolah-olah tidak ada batasnya.

Fenomena pengangguran yang sedemikian besar itu, jika ditelusuri sebabnya, selain berawal dari rendahnya kualitas kesarjanaan yang disandang, rupanya juga terjadi karena lemahnya mental berusaha. Seseorang jika memiliki mental pekerja, maka dengan semangat ia akan mampu mendapatkan modal, memilih jenis pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya, dan bahkan ia akan melakukan apa saja yang pantas dikerjakan. Ia akan malu jika menjadi beban hidup dan bahkan menjadi benalu bagi orang lain. Semangat bekerja akan menumbuhkan semua potensi yang ada pada dirinya. Tetapi sebaliknya, jika ia bermental pemalas, maka juga akan selalu mencari pembenar atas sikap yang

diambil, dan akhirnya memilih menjadi penganggur.

Sebuah kasus menarik, tidak jauh dari rumah saya terdapat panti pijat. Seluruh pekerjaannya tuna netra, termasuk pimpinan dan sekaligus pemilik panti itu. Para pelanggan bisa memanfaatkan jasa pijat memijat ini di tempat usaha itu, tetapi mereka juga melayani datang ke rumah pemesan. Semua pemijatnya adalah tuna netra, karena itu mereka memerlukan jasa antar jemput. Panti ini memiliki manajemen dan sekaligus pembagian keuntungan, termasuk berapa persen yang diberikan kepada pemilik sepeda motor yang bertugas sebagai pengantar jemput tersebut. Yang saya anggap agak lucu, petugas antar jemput tersebut ternyata berstatus mahasiswa. Pertanyaan yang menarik bagi saya adalah apakah mahasiswa ini mampu belajar dari kehidupannya itu, bahwa para tuna netra yang sehari-hari ia layani ternyata sanggup mandiri, membikin panti pijat, dan mempekerjakan teman-temannya agar tidak menggantungkan diri pada orang lain. Pelajaran berharga yang dapat dipetik ialah bahwa ternyata dengan bermodalkan kemauan, ketrampilan dan kesungguhan, tuna netra pun bisa menghidupi diri sendiri dan bahkan teman-temannya mereka yang senasip. Oleh karena itu semestinya, mereka yang tidak mengalami tuna netra, apalagi telah menjadi sarjana, tidak selayaknya menjadi penganggur.

Rasanya dunia ini memang aneh, banyak sarjana pertanian, tetapi menganggur di tengah-tengah luasnya tanah pertanian yang tidak tergarap. Sarjana peternakan menganggur di tengah-tengah lahan yang cukup luas dan potensial untuk berternak. Sarjana ekonomi menganggur di tengah-tengah masyarakat yang membutuhkan tenaga yang mampu mengembangkan ekonomi. Sarjana kedokteran menganggur di tengah-tengah masyarakat yang sedang dirudung banyak penyakit. Sarjana agama yang menganggur, sementara masyarakatnya masih memerlukan pelajaran agama. Inilah dunia aneh. Masih tergolong fenomena aneh, yaitu pada suatu saat saya ke desa. Di desa tersebut saya menemukan anak lulusan pesantren, punya usaha pembibitan, berskala cukup besar. Anehnya, para pekerjaannya justru sarjana lulusan perguruan tinggi ternama. Padahal dengan membanding pendidikan pesantren yang selalu terkesan sederhana dan perguruan tinggi yang selalu modern, bukankah semestinya anak lulusan pesantren sebagai pekerjaannya, sedangkan sarjana pertanian justru berperan sebagai manajer dan sekaligus pemiliknya. Kejadian itu benar-benar aneh, seperti terjadi sesuatu yang berbalik. Tampaknya pendidikan berjalan tanpa meninggalkan bekas. Belajar pertanian, peternakan, perkebunan, perdagangan, ekonomi, pendidikan, agama dan lain-lain, seolah-olah tidak membekas. Mereka selain tidak berhasil mendapatkan pengetahuan, juga tidak terbangun rasa percaya diri, apalagi kecintaan pada bidang keilmuannya itu. Sudah tentu beberapa kasus keanehan tersebut bukanlah termasuk misteri yang sulit dicari jawabnya. Semua itu bisa dijelaskan, yaitu karena kualitas dan etos bekerja yang rendah.

Jika gambaran itu dialami oleh kebanyakan sarjana tanpa terkecuali, maka hal yang seharusnya segera dipertanyakan adalah, bagaimana sistem pendidikan tinggi kita hingga melahirkan sarjana yang tidak berdaya itu. Apakah kurikulum yang dikembangkan selama ini tidak relevan dengan kebutuhan, tenaga pengajar yang kurang kompeten, iklim akademik yang tidak mendorong pengembangan keilmuan, manajemen pendidikan tinggi yang kurang berhasil menumbuhkan kreatifitas seluruh warga kampus, atau lainnya. Pertanyaan ini perlu dijawab segera, agar tidak terlalu banyak korban yang dihasilkannya. Allahu a'lam.